

BAB. I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

*Demokrasi tidak sekali jadi, merupakan suatu proses yang tidak bisa dibendung dan dihentikan lagi.
...tidak pernah mudah, senantiasa mengandung resiko kegagalan, betapapun bersatu, cakap dan beruntungnya mereka yang memperjuangkannya...
(Laurence Whitehead, 1993:57)*

Akronim yang berasal dari Yunani yang paling absurd demos (rakyat) dan cratos (otoritas), atau kekuasaan rakyat, bagaimana mungkin bisa mewujudkan secara absolut dan konkrit? sedangkan pemilu, yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan kekuasaan rakyatpun, sesungguhnya hanya mewakili sebagian dari keseluruhan. Dan sebagian yang menguasai keseluruhan itu, bisa jadi malah membawa masyarakat ke jurang kenestapaan.

Akan tetapi, konsensus yang semakin berkembang dalam rangka menerima demokrasi bersandar pada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Yang paling utama adalah menyangkut hakikat atau arti yang sesungguhnya, yang harus kita lekatkan pada istilah demokrasi itu sendiri. Pengalaman telah menunjukkan bahwa mengenal demokrasi adalah suatu proses yang rumit yang melibatkan lebih dari sekedar transformasi politis belaka. Transisi menuju demokrasi mencakup keseluruhan lembaga politik itu dan hubungan-hubungan sosial diantara mereka. Keberhasilan dalam membangun suatu masyarakat madani yang demokratis tergantung pada komitmen



Gambar 1.1
Demokratia, siapapun yang bergumul dengan kata demokrasi senantiasa membawa keyakinan, harapan...

masyarakat luas terhadap cita-cita demokrasi, pada keterlibatan aktif mereka dalam semua aspek kehidupan politis, sosial dan kultural, pada toleransi terhadap perbedaan yang dipadukan dengan sikap respek terhadap opini-opini mayoritas, maupun pada keberadaan lembaga-lembaga demokrasi dan kepemimpinan politis yang bijaksana.

Begitulah, perjalanan menuju sempurna yang tak pernah selesai itu, membuat orang tak jemu mencari demokrasi. Bukan menjadi cita-cita tinggi nan tergantung di langit, demokrasi lebih tepat menjadi muara samudra dari sungai-sungai ideologi dan kepentingan. Ia mewujudkan sebagai wahana imajiner yang di terima berbagai kalangan untuk bertemu, berdiplomasi, bermain politik, dan mencoba menaklukkan lawan tanpa kekerasan. Karena bila tak ada wahana yang imajiner tersebut, kemajemukan memang mudah memacu konflik yang tak terselesaikan.¹

Siapa pun yang bergumul dengan kata demokrasi senantiasa membawa keyakinan, harapan dan sikap tertentu yang seringkali amat keras, yang mempunyai implikasi sangat kuat pada segala macam kepentingan politis baik kelompok maupun individu. Karena itu pula kata demokrasi dapat dengan mudah dan sering disalahgunakan oleh penguasa diktator yang sengaja melanggar hal dasar dan standart bagi pemerintahan demokratis untuk menggunakan kekuasaannya.

Demikian juga dalam perencanaan dan perancangan karya arsitektur berskala kota hadir karena pengaruh sosial, budaya dan kebijakan kekuasaan pemerintah atau raja dalam suatu kerajaan, yang semuanya memiliki latar belakang politik maupun budaya masing-masing yang menjadi keinginan penguasa pemerintahan sebagai penentu kebijakan.



Gambar 1.2

Dialah orang yang diberi kekuasaan sedemikian rupa sehingga ia bisa mengambil keputusan tanpa menyertakan orang lain, dan melaksanakan keputusan tanpa seorangpun boleh menggugatny.

¹ Bimo Nugroho, Menatap Demokrasi dari Jendela Johari sebuah pengantar, Mencari Demokrasi

Pada masa zaman sebelum Revolusi Industri, permasalahan kota di Eropa lebih banyak beraspek fisik daripada sosial dan ekonomi. Pada waktu itu penguasa tunggal kota yaitu kaisar ataupun raja begitu getolnya membangun citra pribadinya dengan menggunakan seluruh kekuasaannya yang nyaris tanpa batas, membangun proyek dengan skala mercu suar. Saat itu perencanaan kota lebih banyak diartikan sebagai perencanaan fisik (J.C. Snyder & Catanese, 1979). Struktur kotanya menggambarkan fungsi dan peran yang diembannya. Apakah kota tersebut berperan sebagai pusat pemerintahan, kota perdagangan, atau kota industri. Besarnya lahan yang dipakai untuk lokasi kantor-kantor pemerintah dan anggunnya bangunan perkantoran, menggambarkan *kekuatan birokratiknya* dalam mengatur roda pemerintahan kota. Sebaliknya penanganan masyarakat strata bawah belum mendapat perhatian yang cukup.²

Sebagai kota tradisional dan sebagai kota modern, kota Surakarta pada masa pasca kemerdekaan dibangun dengan cepat dan sekaligus setiap jengkalnya dapat diperdagangkan. Kota menjadi komoditas. Hal ini dapat terlihat dengan area public dan public amenities di kota bagi masyarakat tak lagi terpikirkan. Sehingga kerusuhan mei-juni '98 yang telah menhanguskan fasilitas kota termasuk gedung Balai Kota, siapapun pemicunya menjadi besar dan menjadi bukti karena kesenjangan antara rakyat dan pemerintah yang telah tertimbun (Kuntowijoyo :1998).

Memahami dan merasakan arsitektur (kantor pemerintah = balai kota) merupakan bagian dari proses demokratisasi kota yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari penopang dasar demokrasi, maka kehadirannya akan sangat berarti bagi

² Ir. Bambang Setioko, M. Eng., Arsitek Penentu Kebijakan.

proses pemberdayaan dan pengembangan aktivitas sosial budaya masyarakat disamping sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat sebagai fungsi utamanya.

I.2. Rumusan masalah

Menciptakan konsep guna dan citra Balai kota sebagai bangunan kantor pemerintah daerah di bidang eksekutif dan sebagai wadah pengembangan aktivitas sosial budaya masyarakat melalui representasi kekuasaan demokrasi.

I.3. Tujuan dan Sasaran

I.3.1 Tujuan

Tercapainya konsep guna dan citra pada Balai kota yang merepresentasikan kekuasaan demokrasi ke dalam perancangan.

I.3.2 Sasaran

- Konsep representasi kekuasaan demokrasi ke dalam guna dan citra arsitektur.
- Representasi Citra arsitektur yang demokratis ke dalam bentuk bangunan, tata tapak maupun ke dalam ruang dalam.

I.4. Lingkup Bahasan

- Aspek Fungsional, pada pemisahan fungsi sebagai kantor dan ruang publik untuk aktivitas pengembangan masyarakat yang berdasarkan jenis dan karakter kegiatan.
- Bentuk dan tata bangunan yang merepresentasikan kekuasaan demokrasi ke dalam guna dan citra bangunan.

1.5. Metoda Pengumpulan data dan Pembahasan

1.5.1. Metoda Pengumpulan data

- Studi Literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui persyaratan teknis ruang serta untuk mengetahui kaidah-kaidah dari sejarah demokrasi, sistem demokrasi dan kaidah penopang demokrasi kedalam transformasi arsitektur.
- Pengamatan. Pengamatan terhadap setting kota Surakarta yang memiliki karakteristik khusus secara kultural.

1.5.2. Metoda Pembahasan

- Analisa terhadap hasil studi literatur dan studi perbandingan dari beberapa karya arsitektur yang mengedepankan nilai demokrasi (berupa balai kota atau balai negara) untuk kemudian dijadikan perbandingan dalam perancangan.

Sintesis dari data tersebut diatas berupa perbandingan dari karya arsitektur tersebut diperoleh citra bangunan dan simbol-simbol dari proses demokrasi yang merupakan ungkapan Balai Kota sebagai kantor pemerintah daerah dan sebagai wadah pengembangan aktivitas kegiatan sosial dan budaya masyarakat, untuk kemudian dijadikan dasar kedalam perancangan dengan mentransformasikannya ke dalam bentuk bangunan, tata tapak maupun kedalam ruang dalam.

I.6. Sistematika Penulisan

- I. Mengungkapkan Latar belakang, Permasalahan, Tujuan dan Sasaran, Lingkup batasan, Metode Pembahasan, Daftar Isi.
- II. Meninjau kaidah kekuasaan demokrasi yang meliputi kajian umum, kebutuhan ruang dan standarisasi ruang pada Balai Kota sebagai Kantor Pemerintah dan wadah pengembangan aktivitas masyarakat.
- III. Menganalisa dari kajian umum (teori), studi perbandingan.
- IV. Mengemukakan Konsep Perancangan Representasi kekuasaan demokrasi ke dalam guna dan citra arsitektur. Konsep Perancangan Balai Kota sebagai wadah kegiatan pemerintahan dan pengembangan aktivitas sosial budaya masyarakat.

